

## ABSTRAKSI

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang sangat potensial. Penerimaan daerah dari retribusi pasar cukup besar dan ke depan apabila dikelola dengan baik prospeknya bisa diandalkan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi retribusi pasar dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Alat analisi yang digunakan adalah analisis potensi.

Hasil perhitungan potensi retribusi pasar dalam sepuluh tahun adalah sebesar Rp. 2.908.656.000,- (2001), Rp. 2.908.656.000,- (2002), Rp. 2.908.656.000,- (2003), Rp. 2.908.656.000,- (2004), Rp. 2.908.656.000,- (2005), Rp. 2.908.656.000,- (2006), Rp. 2.908.656.000,- (2007), Rp. 2.908.656.000,- (2008), Rp. 2.908.656.000,- (2009), Rp. 2.908.656.000,- (2010), hal ini dikarenakan selama sepuluh tahun tersebut tidak ada penambahan jumlah kios, los, dasaran, tidak ada kenaikan retribusi, dan tidak ada kenaikan sewa tanah dan bangunan baik untuk kios, los, serta dasaran.

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, dalam penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi secara berkesinambungan menghitung potensi retribusi pasar agar setiap perubahan terhadap obyek retribusi dapat di hitung secara akurat dan hasil perhitungan potensi retribusi pasar tersebut harus dijadikan dasar penetapan target retribusi pasar.

Kata Kunci : retribusi pasar, retribusi daerah, potensi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia mempunyai struktur yang kompleks baik secara horisontal karena terdiri dari begitu banyak departemen dan lembaga-lembaga negara, maupun secara vertikal karena terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Tingkat I, pemerintah daerah Tingkat II, dan pemerintahan desa. Hal tersebut diatas menjadikan peranan pemerintah akan selalu meningkat dan dinamis sehingga membutuhkan anggaran yang semakin besar. Kecenderungan pun berubah, dari pemerintahan dengan sentralisasi yang kuat ke arah desentralisasi. Pemberian otonomi penuh kepada daerah kabupaten atau kota merupakan bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah kabupaten atau kota. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Salah satu potensi penting dalam rangka meningkatkan otonomi daerah adalah : adanya kemampuan daerah di bidang keuangan untuk mencukupi penyelenggaraan pemerintahan, memproses dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pelayanan daerah terhadap masyarakat.

Faktor kemampuan daerah untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan dari



otonomi kabupaten atau kota yang merupakan alat utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun sampai saat ini dana perimbangan masih belum mampu memenuhi semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab daerah. Hal ini terbukti dengan masih maraknya perdebatan mengenai formula dan besarnya dana alokasi umum yang diminta atau diberikan kepada daerah, karena pada masing-masing daerah mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda jumlahnya, bagi daerah yang kemampuan sumber daya alam sangat terbatas sangat dominan akan tergantung kepada pemerintah pusat.

Di sisi lain, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang semakin besar kepada daerah juga menuntut daerah untuk lebih mampu mengali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah itu sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui berbagai upaya yaitu dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan dengan memperhitungkan dan mengoptimalkan potensi yang tersedia serta upaya mengali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan dikembangkan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah;



- b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
  3. Pinjaman daerah.
  4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Dari berbagai jenis sumber penerimaan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber daya yang sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah. Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Sumber penerimaan lainnya adalah sisa anggaran tahun sebelumnya juga dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Upaya peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Cara intensifikasi yaitu untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD dengan tidak menambah sumber penerimaan baru, dengan kata lain bagaimana caranya mengelola sumber daya yang sudah ada menjadi sumber penerimaan lebih baik. Sedangkan peningkatan PAD dengan ekstensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan dengan cara menambah sumber penerimaan yang baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Penerimaan PAD di Kabupaten Ngawi dapat dilihat di dalam tabel 1.1, sedangkan tentang realisasi PAD serta kontribusi tiap jenis PAD yang ada dalam tabel 1.2.

Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi  
Tahun 2001 – 2010  
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Jenis PAD				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Pendapatan Lain-lain	
2001	3.876.019.550	4.750.200.395	330.640.250	5.978.565.770	14.935.425.690
2002	4.013.096.000	4.950.750.695	345.780.000	7.440.608.775	16.750.235.470
2003	4.533.488.141	5.020.629.426	154.680.000	8.181.006.530	17.889.764.097
2004	5.193.181.087	5.642.286.414	223.090.287	6.991.070.021	18.049.627.809
2005	5.746.234.704	6.130.593.626	216.457.267	6.315.158.871	18.408.444.468
2006	6.196.509.620	6.890.128.248	254.672.300	6.653.931.986	19.995.242.154
2007	6.348.835.434	7.464.895.931	1.398.700.155	5.523.398.945	20.735.830.465
2008	8.391.451.764	8.000.621.944	1.246.498.000	5.224.679.525	22.863.251.233
2009	8.794.830.081	10.000.480.061	1.093.549.352	6.003.935.382	27.489.897.884
2010	9.570.565.596	13.127.635.156	1.543.003.805	3.248.693.327	27.489.897.884

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi  
Tahun 2001 - 2010.



Tabel 1.2  
Kontribusi Jenis PAD Terhadap Realisasi PAD Kabupaten Ngawi  
Tahun 2001-2010  
(%)

Tahun Anggaran	Jenis PAD				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Pendapatan Lain-lain	
2001	25,95	31,8	2,21	40,02	100
2002	23,95	29,55	2,06	44,42	100
2003	25,34	28,06	0,86	45,73	100
2004	28,71	31,25	1,23	38,73	100
2005	31,21	33,3	1,17	34,30	100
2006	30,98	34,45	1,27	33,27	100
2007	30,61	35,99	6,74	26,63	100
2008	36,7	34,99	5,45	22,85	100
2009	33,96	38,62	4,23	23,18	100
2010	34,81	47,75	5,61	11,81	100

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi  
Tahun 2001 -2010.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dihitung besarnya laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 menggunakan rumus rata-rata geometrik (Geometrik Mean). Rumus rata-rata geometrik (Geometrik Mean) adalah sebagai berikut :

*commit to user*



$$G = \sqrt[n]{X_1 \times X_2 \times X_3 \dots \dots \dots X_n}$$

$$\text{Log } G = \frac{\text{Log } X_1 + \text{Log } X_2 + \text{Log } X_3 \dots \dots \dots + \text{Log } X_n}{n}$$

Keterangan :

G = anti log (Log G)

G : rata-rata geometrik

$X_i$  : data ke  $i$

$n$  : banyaknya data.

Dari rumus rata-rata geometrik diatas laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi sebesar Rp 20.0791.184.780,00, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi selama 10 tahun.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat tahun 2002 pajak daerah turun 4,04 %, retribusi daerah turun 3,66 %, Laba BUMD turun 3,51 %, Pendapatan lain-lain naik 5,21 %, pada tahun 2003 pajak daerah naik 2,86 %, retribusi daerah turun 2,58 %, Laba BUMD turun 41,09 %%, Pendapatan lain-lain naik 1,45%, pada tahun 2004 pajak daerah naik 6,23 %, retribusi daerah naik 5,37 %, Laba BUMD turun 17,7 %, Pendapatan lain-lain turun 8,28 %, pada tahun 2005 pajak daerah naik 4,17 %, retribusi daerah naik 3,17%, Laba BUMD turun



4,09 %, Pendapatan lain-lain turun 6,06%, pada tahun 2006 pajak daerah turun 0,36 %, retribusi daerah naik 1,69 %, Laba BUMD naik 4,09%, Pendapatan lain-lain naik 1,52 %, pada tahun 2007 pajak daerah turun 0,6 %, retribusi daerah naik 2,18%, Laba BUMD naik 68,28%, Pendapatan lain-lain turun 1,52 %, pada tahun 2008 pajak daerah naik 9,04 %, retribusi daerah turun 1,4%, Laba BUMD turun 10,5%, Pendapatan lain-lain turun 7,63%, pada tahun 2009 pajak daerah turun 3,8 %, retribusi daerah naik 4,93 %, Laba BUMD turun 12,6%, Pendapatan lain-lain naik 0,71%, dan pada tahun 2010 pajak daerah naik 1,23%, retribusi daerah naik 10,57 %, Laba BUMD naik 14,02 %, dan Pendapatan lain-lain naik turun 32,49%.

Melihat Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat diketahui retribusi daerah dan pajak daerah sama-sama mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi.

Madiasmu (2000:4) menyarankan pemerintah daerah jika mau menambah PAD hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *“the last effort”* saja. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang ditargetkan cukup potensial sebagai penyumbang pada retribusi daerah. Dari seluruh pos retribusi daerah di Kabupaten Ngawi, tahun 2001 retribusi pasar ditargetkan memperoleh sebesar Rp. 895.230.000,00, tahun 2002 sebesar Rp. 915.840.000,00, tahun 2003 sebesar Rp. 936.753.000,00, tahun 2004 sebesar Rp. 975.500.000,00, tahun 2005 sebesar Rp. 1.905.500.000,00, tahun 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,00, tahun 2007 sebesar 1.145.670.000,00, tahun 2008 sebesar Rp. 1.240.500.000,00, tahun 2009 sebesar Rp. 1.310.000.000,00, dan tahun 2010 sebesar Rp.



2.200.000.000,00. Pada saat realisasi anggaran, hasilnya lebih dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Didalam tabel 1.4 memperlihatkan besaran kontribusi antara target dan realisasi anggaran.

Tabel 1.3  
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Berdasarkan  
Target dan Realisasi di Kabupaten Ngawi  
Tahun 2001-2010  
(dalam rupiah)

Tahun	Target			Realisasi		
	Retribusi Pasar	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	Retribusi Pasar	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)= $(2/3) \times 100\%$	(5)	(6)	(7)= $(5/6) \times 100\%$
2001	895.230.000	4.550.300.000	19,67	910.475.335	4.750.200.395	19,16
2002	915.840.000	4.875.200.000	18,78	940.325.500	4.950.750.695	18,99
2003	936.753.000	4.995.610.000	18,75	961.242.700	5.020.629.426	19,14
2004	975.500.000	5.209.000.000	18,72	1.075.537.600	5.642.286.414	19,06
2005	1.090.500.000	5.850.000.000	18,64	1.107.725.900	6.130.593.626	18,06
2006	1.100.000.000	6.550.400.000	16,79	1.135.830.300	6.890.128.248	16,48
2007	1.145.670.000	7.200.500.000	15,91	1.153.128.600	7.464.895.931	15,44
2008	1.240.500.000	7.970.388.000	15,56	1.254.404.100	8.000.621.944	15,67
2009	1.310.000.000	9.960.404.000	13,15	1.324.214.200	10.000.480.061	13,24
2010	2.200.000.000	11.874.370.000	18,52	2.286.784.695	13.127.635.156	17,41

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi  
Tahun 2001 - 2010.



Pada Tabel 1.3 dapat dilihat, bahwa kontribusi yang ditargetkan dari retribusi pasar terhadap retribusi daerah cukup besar. Tahun 2001 sebesar 19,67%, tahun 2002 sebesar 18,78%, tahun 2003 sebesar 18,75%, tahun 2004 sebesar 18,72%, tahun 2005 sebesar 18,64%, tahun 2006 sebesar 16,79%, tahun 2007 sebesar 15,91%, tahun 2008 sebesar 15,56%, tahun 2009 sebesar 13,15%, dan pada tahun 2010 sebesar 18,52% dari total target retribusi daerah. Sementara realisasi tahun 2001 sebesar 19,16%, tahun 2002 sebesar 18,99%, tahun 2003 sebesar 19,14%, tahun 2004 sebesar 19,06%, tahun 2005 sebesar 18,06%, tahun 2006 sebesar 16,48%, tahun 2007 sebesar 15,44%, tahun 2008 sebesar 15,67%, tahun 2009 sebesar 13,24%, dan pada tahun 2010 sebesar 17,41% dari total realisasi retribusi daerah. Sesuai dengan uraian diatas, maka permasalahan umum yang ditemui dalam pengelolaan retribusi pasar adalah realisasi tidak sesuai dari target yang ditetapkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi tahun 2001 sampai tahun 2010.
2. Bagaimanakah selisih antara target, realisasi, dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi tahun 2001 sampai tahun 2010.



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menghitung potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ngawi.
2. Menghitung selisih antara target, realisasi, dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan target dan pengelolaan retribusi pasar. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembiayaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

### E. Ruang Lingkup

Di dalam melakukan penelitian ini variabel-variabel atau data yang dipelajari terdiri dari :

1. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Target penerimaan retribusi pasar;
3. Realisasi penerimaan retribusi daerah;
4. Tarif pemungutan retribusi pasar;
5. Jumlah kios, los, pedagang lesehan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepastian mengenai jumlah alokasi dan mekanisme penyaluran akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan jenis dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada intinya, desentralisasi fiskal berupaya memberikan jaminan kepastian bagi pemerintah daerah bahwa ada penyerahan kewenangan dan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang telah ditentukan.

Tetapi pola desentralisasi fiskal yang hingga sekarang diterapkan di Indonesia masih terfokus pada otonomi pembiayaan, bukan pada otonomi pendapatan. Sekalipun daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri tetapi ada pengecualian terhadap eksplorasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pola transfer keuangan dari



pusat ke daerah masih menjadi elemen penting untuk menunjang kapasitas keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal menjadi elemen penting bagi pemerintah daerah untuk menutup pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Implikasinya, Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antardaerah.

Sejauh mana desentralisasi fiskal melalui instrumen utama dana alokasi umum atau Dana Alokasi Umum dan pemberlakuan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berhasil memberikan kontribusi bagi daerah untuk menekan ketimpangan di Indonesia? Pertanyaan inilah yang menjadi titik berat yang harus dikaji lebih dalam, mengingat masih besarnya disparitas antar daerah di Indonesia.

Disparitas antardaerah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber



penerimaan antara daerah satu dan daerah lainnya, selain juga perkembangan industri setempat.

Ketidakadilan perimbangan pendapatan daerah atas eksplorasi sumber daya alam juga masih terjadi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi produsen migas di Indonesia seperti Riau dan Kalimantan Timur.

Porsi kecil yang diterima daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah-daerah tersebut, karena sebagian besar hasil eksplorasi Sumber Daya Alam lebih banyak di parkir di pusat dibanding di daerah. Kondisi akan semakin buruk lagi, apabila daerah-daerah tersebut menghadapi penghapusan Dana Alokasi Umum karena peringkat "Kaya" dari pemerintah pusat hanyalah sebatas peringkat, sebabkan daerah-daerah tersebut tidak merasakan secara signifikan hasil Sumber Daya Alam-nya sendiri dan pemerintah dianggap menjadi *predatory state* yang mengeksploitasi daerah secara besar-besaran tanpa menyelaraskan dengan peningkatan pembangunan prasarana ekonomi terlebih lagi dengan penghapusan Dana Alokasi Umum terhadap daerah-daerah tersebut.

Landasan hukum pelaksanaan Dana Alokasi Umum adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri bersih. Dalam perhitungan Dana



Alokasi Umum, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kebutuhan Fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) dan Sumber Daya Alam yang diterima oleh daerah. Berdasarkan UU diatas, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan Dana Alokasi Umum, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dasar inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat daerah kaya (DKI Jakarta, Kaltim dan Riau) dan memperoleh penghapusan Dana Alokasi Umum.



Dilihat dari sisi ekonomi, penghapusan Dana Alokasi Umum untuk beberapa daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Penghapusan ini akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas kepada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula.

Imbas yang lain adalah terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik/infrastruktur yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional.

Dengan penghapusan Dana Alokasi Umum tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut yang dikarenakan akan meningkatnya biaya investasi akibat pengenaan pajak daerah yang tinggi. Kenaikan pajak daerah yang tinggi ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh daerah untuk menutupi pembiayaan program daerah sebagai imbas dari penghapusan Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat. Penghapusan Dana Alokasi Umum inipun nantinya akan berimbas pada ketimpangan vertikal yang semakin melebar, sedangkan tujuan desentralisasi fiskal (Dana Alokasi Umum sebagai salah satu instrumen) bertujuan untuk mengurangi/mengikis ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.



## 2. Pendapatan Asli Daerah

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali lima bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal dan Agama.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi).

Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka tidak ada upaya lain kecuali mengoptimalkan peran Pendapatan Asli Daerah di dalamnya. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat



terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Pergeseran kewenangan dan penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan tersebut menempatkan Pemda (Pemda kota dan kabupaten sebagai ujung tombak implementasi Otonomi) pada posisi yang sulit. Selain keterbatasan kemampuan keuangan dan Sumber Daya Manusia, Pemda juga dihadapkan pada lingkungan usaha yang semakin dinamis sebagai akibat gelombang globalisasi ekonomi.

Arus globalisasi ini nyaris tidak terbandung, menjalar ke berbagai pelosok daerah melalui wahana travel, transport and telecommunication, yang semakin murah dan nyaman bagi penggunaanya. Proses globalisasi tersebut telah membuka peluang dan kesempatan bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya, baik yang telah berjalan selama ini maupun jenis usaha baru. Akibatnya pihak Pemda juga dihadapkan pada tuntutan dunia pendidikan agar memberikan respon kebijakan secara memadai terhadap rezim informasi yang semakin terbuka dan dilakukannya pergeseran pendekatan dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan Pemda dalam menjawab berbagai tantangan diatas adalah respon Pemda terhadap desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Dua sisi ekstrim dari respon dimaksud adalah :

*commit to user*



- (a) Apakah Pemda memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya ataukah
- (b) Pemda mementingkan peningkatan efektivitas pengeluaran nya (*expenditure policy*) di bidang pendidikan.

Dua bentuk respon diatas dapat merupakan pilihan yang masing - masing berdiri sendiri (*mutually exclusive*) sehingga memilih salah satu berarti tidak memilih yang lain. Namun, juga sangat mungkin untuk dipilih bersama, yaitu bila setiap tindakan peningkatan penerimaan jelas tujuan penggunaan dananya.

### 3. Potensi

Potensi adalah sebagai sesuatu yang mesti dikenali dan diwujudkan ([www.scrbd.com](http://www.scrbd.com)). Pada kamus bahasa Indonesia potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Dengan demikian, jika pengertian potensi tersebut dikaitkan/digabungkan dengan retribusi, maka potensi retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat diterima/dipungut dan dikembangkan sesuai dengan keadaan obyeknya dan diharapkan dapat dipungut dari wajib retribusi pada waktu tertentu, atau sebagai suatu kemampuan maksimal dari retribusi itu sendiri untuk dieksploitasi dengan kemampuan optimal untuk mengeksploitasikannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa potensi retribusi menggambarkan sejauh mana dasar/basis dari retribusi tersebut dapat dimanfaatkan dan dicapai agar memperoleh retribusi yang maksimal. Selain



itu juga, potensi retribusi merupakan suatu yang dapat diukur secara kuantitatif dengan metode tertentu, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Adapun yang dimaksud dengan potensi penerimaan retribusi pasar di dalam tesis ini adalah potensi penerimaan retribusi pasar yang didasarkan atas tingkat pemanfaatan tempat usaha, baik yang berupa kios, los, dan dasaran.

#### **4. Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan (wikipedia.org). Munawir (1998:5) mendefinisikan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Didalam pelaksanaannya jenis serta tata cara pengambilan retribusi ditentukan dan diatur melalui Peraturan Daerah dari masing-masing daerah Kabupaten atau Kota.



## 5. Retribusi Pasar

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksudkan retribusi pasar adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa halaman/pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Soeratno dan Saleh (2002:18), mengatakan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu jenis pungutan yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Besarnya retribusi ini bervariasi menurut kelas pasar dan fasilitas yang tersedia serta jenis dagangan. Oleh karenanya retribusi dengan jasa tempat berjualan ini disebut retribusi pasar. Retribusi pasar yang diatur dalam perda akan tercermin adanya wajib retribusi, obyek retribusi dan besarnya tarif retribusi. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran tetap maupun tidak tetap di dalam pasar.

## 6. Kesenjangan antara potensi, target, dan realisasi

Pengetahuan terhadap potensi penerimaan retribusi pasar yang ada merupakan suatu hal yang penting, terutama untuk menentukan besarnya target penerimaan retribusi pasar. Potensi atas retribusi pasar didasarkan atas klasifikasi pasar dan tarif retribusi pasar, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dari pihak pengelola pasar, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi bahwa dalam menentukan target penerimaan di setiap komponen jenis retribusi (termasuk retribusi pasar) didasarkan pada

*commit to user*



kondisi riil dilapangan, yang benar-benar menjadi pertimbangan dari pihak pengelola anggaran daerah.

Kecenderungan yang selama ini terjadi terhadap penetapan target dari retribusi pasar di dalam pendapatan asli daerah hanya didasarkan atas prosentase peningkatan sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada potensi yang sebenarnya. Apabila kesenjangan antara potensi, target, dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan obyektif, maka upaya peningkatan terhadap potensi pendapatan asli daerah perlu terus dilakukan dengan maksud agar target yang direncanakan didasarkan atas potensi yang benar.

## **7. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai retribusi pasar telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil dan kesimpulan yang dikemukakan antara lain:

Julius Denny (2008) melakukan penelitian di Kabupaten Nabire menyimpulkan retribusi pasar Kabupaten Nabire mempunyai potensi yang cukup prospektif, dan menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup efisien, realisasi penerimaan melebihi target dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun relatif kecil. Selama tahun anggaran 2003-2007, tingkat efisiensi retribusi pasar rata-rata 17,43%. Tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar pada tahun 2007 yaitu sebesar 143,26%. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan 28,54% per tahun. Proyeksi penerimaan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar tidak melebihi dari potensi yang ada.



Penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2003) di kawasan Subosuka Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) menunjukkan retribusi daerah mendominasi terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio antara retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dominan adalah Kabupaten Boyolali (sebesar 73%), diikuti Kabupaten Sragen (sebesar 72 %), Wonogiri (sebesar 70 %), Karanganyar (sebesar 54 %), Klaten (sebesar 50 %), dan Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintahan Kota Surakarta masing-masing sebesar 46 %. Penelitian ini mendukung bahwa retribusi daerah lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada penerimaan lainnya.

Mahi (2000:59) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi antara lain disebabkan karena kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak/retribusi daerah cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.

## B. Landasan Teori

Pemberlakuan otonomi daerah diarahkan untuk berusaha mengali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar keuangan suatu daerah berarti akan semakin besar pula daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Apabila dilihat dari sisi penerimaan daerah, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang strategis dan dapat memberikan



sumbangan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu perlu digali dan dilelola secara efisien dan efektif agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tahun semakin meningkat.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk mendayagunakan potensi yang ada melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pendayagunaan potensi yang ada di daerah harus tetap dalam batas-batas kewajaran, yang tolok ukurnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban pungutan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu retribusi yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan suatu bentuk pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa fasilitas pasar tradisional yang terdiri dari pelataran pada los pasar dan pelataran terbuka, petak los maupun kios permanen yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

### C. Kerangka Konseptual

Pungutan retribusi merupakan sumber penerimaan keuangan bagi daerah, dimana dengan penerimaan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan *commit to user* khususnya dalam lingkungan pasar. Pemerintah daerah dalam mengelola pasar

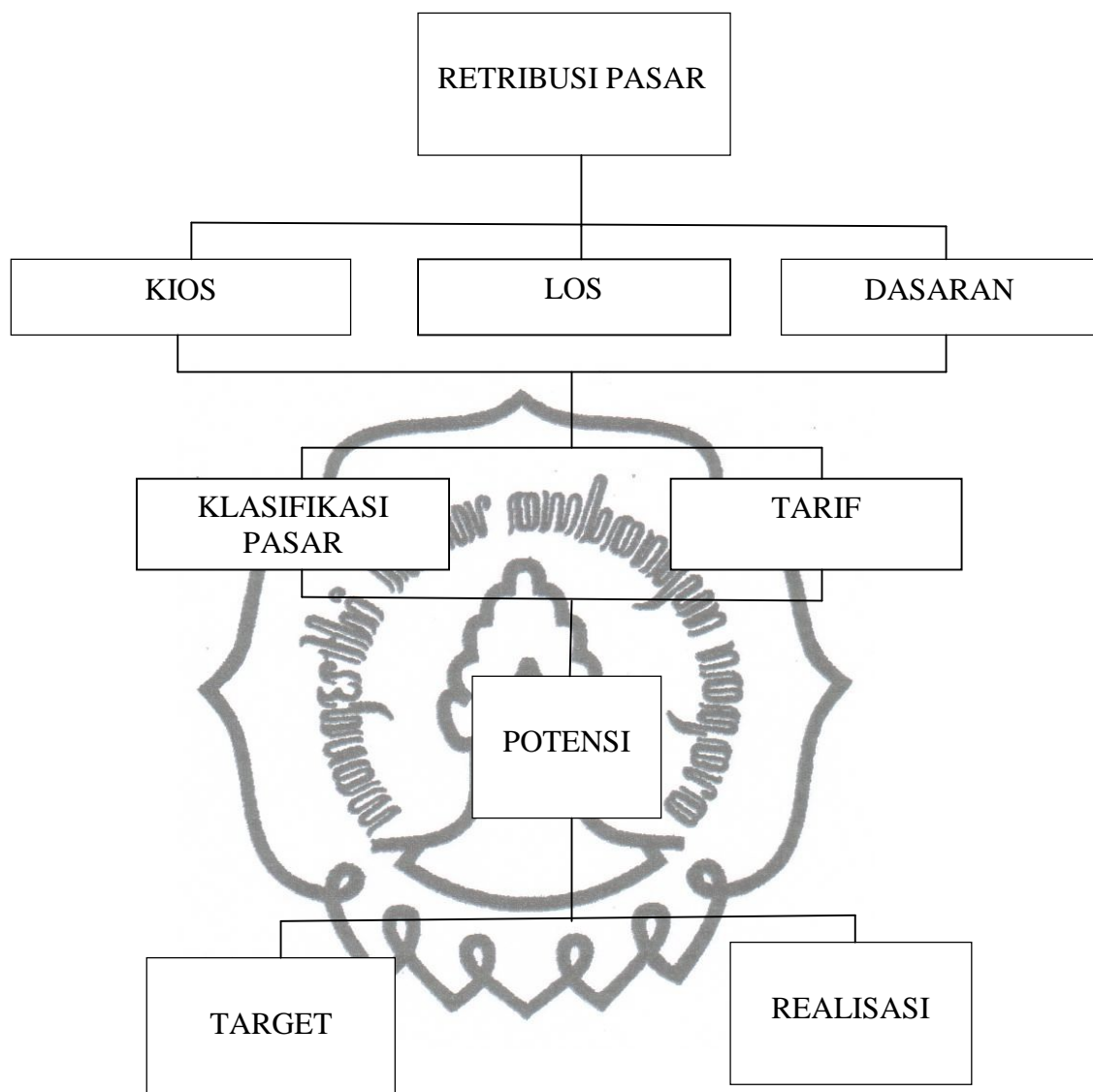


dibagi dalam kios, los, dasaran dan klasifikasi kelas pasar sesuai dengan yang di tetapkan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut retribusi pasar hanya di pungut atas jasa pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah daerah dari pedagang yang memanfaatkan fasilitas/sarana dan prasarana pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi obyek retribusi pasar adalah fasilitas/sarana dan prasarana pasar yaitu berupa kios, los, dasaran, yang khusus disediakan untuk pedagang. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan kepada kios, los, dasaran, dan kelas pasar yang digunakan. Penentuan kelas pasar disesuaikan dengan surat Keputusan Bupati, sedangkan potensi retribusi pasar berdasarkan atas tingkat pemanfaatan tempat usaha baik kios, los, dasaran yang ada.

Potensi retribusi pasar bisa diperkirakan dengan menghitung jumlah kios, los, dasaran dan klasifikasi obyek pungutan dikalikan dengan tarif yang berlaku secara langsung. Guna memudahkan dalam proses analisis permasalahan yang dikemukakan, secara sederhana dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1



Sumber : Data diolah

#### D. Hipotesis

Hipotesis didalam penelitian ini adalah :

1. Di duga target retribusi pasar yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan potensi yang ada.
2. Di duga adanya selisih antara target, realisasi, dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi.

*commit to user*



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif ini maksudnya untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga dikaji potensi retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.

##### **A. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 19 pasar yang ada di Kabupaten Ngawi. Adapun 19 pasar tersebut adalah :

1. Pasar Ngawi;
2. Pasar Beran;
3. Pasar Paron;
4. Pasar Ngale;
5. Pasar Gentong;
6. Pasar Karangjati;
7. Pasar Samben;
8. Pasar Sembung;
9. Pasar Padas;
10. Pasar Kedungprahu;
11. Pasar Jogorogo
12. Pasar Mluwur;
13. Pasar Kendal;



14. Pasar Kedunggalar;
15. Pasar Simo;
16. Pasar Ngrambe;
17. Pasar Sine;
18. Pasar Walikukun;
19. Pasar Ngancar.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Data dan Informasi yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari beberapa sumber antara lain : (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi; (2) Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi; (3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. Untuk mengumpulkan data tersebut, dilakukan dengan cara pencatatan atau foto copy data publikasi, laporan dari dinas terkait, studi kepustakaan, wawancara, dan melalui media elektronik (internet).

## **C. Definisi Operasional**

Beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini (Anem, 2003:25) adalah :

1. Potensi penerimaan retribusi pasar adalah keseluruhan daya yang dimiliki obyek retribusi pasar baik berupa fisik maupun jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat menghasilkan penerimaan daerah dalam bentuk retribusi pasar;

*commit to user*



2. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
3. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang, beratap tanpa dilengkapi dinding;
4. Target adalah batas penerimaan retribusi pasar dalam rupiah yang ditetapkan setiap tahunnya;
5. Realisasi penerimaan adalah jumlah penerimaan yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah pada periode tertentu.

#### **D. Variabel-variabel yang dipelajari**

Data atau variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Target penerimaan retribusi pasar;
3. Realisasi penerimaan retribusi daerah;
4. Jumlah kios, los, dan pedangan lesehan.

#### **E. Teknik Analisis**

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka didalam menganalisis permasalahan yang ada, peneliti menggunakan pendekatan pendekatan kuantitatif.

Mengadopsi formulasi perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik. Formulasi potensi



menurut Soeratno dan Samsubar Saleh (2002;23) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PRP = \{(\sum jk \times r) + (\sum jl \times r) + (\sum jls \times r) + (\sum jk \times stb) + (\sum jl \times stb) + (\sum jls \times stb)\}$$

Keterangan :

PRP = potensi retribusi pasar

jk = jumlah kios

jl = jumlah los

jls = jumlah pedagang lesehan

r = retribusi yang dikenakan

stb = sewa tanah dan bangunan

Rumus tersebut dimodifikasi dengan memasukan variabel-variabel yang menjadi dasar pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Ngawi dan dipergunakan dalam perhitungan potensi pasar, diformulasikan menjadi :

$$PRP = \{(\sum jk \times r) + (\sum jl \times r) + (\sum jd \times r) + (\sum jls \times r) + (\sum jk \times stb) + (\sum jl \times stb) + (\sum jls \times stb)\}$$

Keterangan :

PRP = potensi retribusi pasar

jk = jumlah kios

jl = jumlah los

jd = jumlah dasaran

jls = jumlah pedagang lesehan

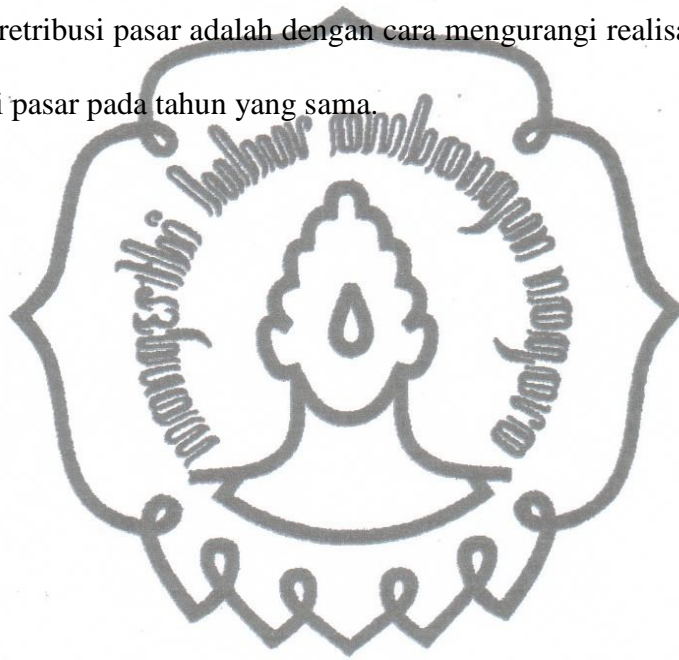
r = retribusi yang dikenakan

*commit to user*

stb = sewa tanah dan bangunan



Untuk mengetahui selisih antara target dan realisasi retribusi pasar adalah dengan cara mengurangi target dengan realisasi retribusi pasar pada tahun yang sama, untuk mengetahui selisih antara target dan potensi retribusi pasar adalah dengan cara mengurangi target dengan potensi retribusi pasar pada tahun yang sama, dan untuk mengetahui selisih antara realisasi dan potensi retribusi pasar adalah dengan cara mengurangi realisasi dengan potensi retribusi pasar pada tahun yang sama.





## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Kabupaten Ngawi

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur secara geografis terletak pada posisi  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan  
(Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten  
Bojonegoro.

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten  
Sragen (Propinsi Jawa Tengah).

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Keadaan topografi Kabupaten Ngawi berdasarkan ketinggian tempat cukup bervariasi. Wilayah bagian selatan Kabupaten Ngawi berupa pegunungan dengan ketinggian tempat berkisar antara 1500-2700 m diatas permukaan laut, dan sebagai puncaknya adalah Gunung Lawu.

Berdasarkan ketinggian tempatnya, wilayah Kabupaten Ngawi dikelompokkan menjadi :



1. Daerah dengan ketinggian  $< 50$  m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngawi, Paron, Geneng, Pangkur, dan Kasreman. Di daerah ini pasar milik Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah Pasar Ngawi, Pasar Beran, Pasar Paron, dan Pasar Mluwur.
2. Daerah dengan ketinggian  $50 - 100$  m dari permukaan laut sebagian wilayah Kecamatan Pangkur, Karangjati, Bringin, Kasreman, Pitu, Geneng, Kedunggalar, Widodaren, Mantingan, dan Karangannya. Di daerah ini pasar milik Pemerintah kabupaten Ngawi adalah Pasar Karangjati, Pasar Sembung, Pasar Padas, Pasar Samben, Pasar Ngancar, Pasar Kedunggalar, dan Pasar Walikukun.
3. Daerah dengan ketinggian  $100 - 150$  m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine. Di daerah ini pasar milik Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah Pasar Ngrambe, Pasar Jogorogo, Pasar Kendal, Pasar Simo, dan Pasar Sine.
4. Daerah dengan ketinggian  $150 - 200$  dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Mantingan, Karanganyar, Widodaren, Kedunggalar, Gerih, Pitu, Bringin, Ngrambe, Kasreman, Jogorogo, Kendal dan Sine.
5. Daerah dengan ketinggian  $200 - 250$  m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.



6. Daerah dengan ketinggian 250 – 500 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
7. Daerah dengan ketinggian 500 – 800 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
8. Daerah ketinggian 800 – 1200 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
9. Daerah ketinggian 1200 – 1500 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
10. Daerah ketinggian 1500 – 1800 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
11. Daerah ketinggian 1800 – 2100 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
12. Daerah ketinggian 2100 – 2400 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.
13. Daerah ketinggian 2400 – 2700 m dari permukaan laut terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal, dan Sine.



Topografi wilayah Kabupaten Ngawi menurut kelerengannya cukup bervariasi. Berdasarkan kelerengannya topografi wilayah Kabupaten Ngawi dikelompokkan menjadi :

1. Wilayah dengan kelereng  $< 2\%$  terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar, Widodaren, Mantingan, Kedunggalar, Pitu, Paron, Ngawi, Geneng, Pangkur, Kasreman, Bringin dan Karangjati.
2. Wilayah dengan kelereng  $2 - 5\%$  terdiri atas sebagian besar wilayah Kecamatan Karanganyar, Pitu, Kasreman, Ngawi, Bringin, Karangjati, Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal.
3. Wilayah dengan kelereng  $5 - 10\%$  terdiri atas sebagian wilayah kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal.
4. Wilayah dengan kelereng  $10\% - 20\%$  terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal.
5. Wilayah dengan kelereng  $20\% - 30\%$  terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal .
6. Wilayah yang kelereng  $30\% - 40\%$  m terdiri atas sebagian besar wilayah Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal.
7. Wilayah dengan kelereng  $> 40\%$  terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Sine, Ngrambe, jogorogo, Kendal.

Wilayah bagian selatan memiliki tingkat kelereng yang cukup bervariasi karena wilayah tersebut merupakan deretan pegunungan yang terletak di lereng Gunung Lawu.



Dalam struktur pemerintahan wilayah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 217 desa dan kelurahan, 17 kecamatan, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Ketujuh belas kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal, Geneng, Kwadungan, Pitu, Widodaren, Pangkur, Karangjati, Bringin, padas Ngawi, Paron, Kedunggalar, Mantingan, dan Karanganyar. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan. Tambahan kecamatan baru tersebut yaitu Kecamatan Gerih dan Kecamatan Kasreman. Kecamatan Gerih merupakan pemekaran dari Kecamatan Geneng, sedangkan Kecamatan Kasreman merupakan pemekaran dari kecamatan Padas.

## 2. Kondisi Demografi

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bidang sosial merupakan bidang yang terkait langsung dengan masyarakat sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Komposisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bervariasi merupakan pencerminan secara khusus dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan, secara kuantitatif penduduk Kabupaten Ngawi mayoritas adalah pemeluk agama Islam (lebih dari 95%). Secara umum pemeluk Islam tersebut mayoritas memiliki kedekatan hubungan kultural dengan organisasi masyarakat



(ormas) Nahdhatul Ulama. Hal tersebut dalam kenyataan sehari-hari cukup memberi pengaruh bagi interaksi antar penduduk dan antar kelompok masyarakat.

Secara umum, interaksi antar warga masyarakat sehari-hari relatif aman dan damai, jika terdapat benturan-benturan kecil antar warga masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa memperkeruh suasana. Kiranya hanya pada saat tumbangnya Orde Baru (tahun 1998-1999), sebagaimana kondisi berbagai wilayah Indonesia lainnya, terjadi gesekan antar kelompok yang cukup berarti dalam kehidupan sehari-hari, namun kini hal tersebut telah berlalu. Bahkan hikmah dari gesekan tersebut adalah terdapatnya warisan positif berupa tumbuh-kembangnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sejenisnya yang cukup memberi warna baru dalam dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Ngawi.

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada tahun 2009 menurut jenis kelamin pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sine	22.601	25.580	48.181
2	Ngrambe	21.163	21.412	45.575
3	Jogorogo	20.176	21.183	41.359
4	Kendal	24.413	26.419	50.832
5	Geneng	27.717	28.118	55.835
6	Gerih	18.184	19.289	37.473
7	Kwadungan	14.199	14.483	28.682
8	Pangkur	13.996	14.631	28.627
9	Karangjati	23.211	24.825	48.036
10	Bringin	15.890	16.344	32.234
11	Padas	16.911	16.949	33.860
12	Kasreman	12.013	12.006	24.019
13	Ngawi	41.928	42.431	84.359
14	Paron	44.066	45.300	89.366
15	Kedunggalar	36.901	37.212	74.113
16	Pitu	14.060	14.180	28.240
17	Widodaren	35.094	35.787	70.881
18	Mantingan	19.855	22.023	41.878
19	Karanganyar	15.842	15.654	31.496
Jumlah		438.220	453.826	892.046

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten



Ngawi tahun 2009 adalah 688 jiwa/Km<sup>2</sup>, naik sekitar 5 jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2  
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi

NO	Nama Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Sine	80,22	48.181	601
2	Ngrambe	57,49	45.575	741
3	Jogorogo	65,84	41.359	628
4	Kendal	84,56	50.832	601
5	Geneng	52,52	55.835	1063
6	Gerih	34,52	37.473	1086
7	Kwadungan	30,30	28.682	947
8	Pangkur	29,41	28.627	973
9	Karangjati	66,67	48.036	721
10	Bringin	62,62	32.234	515
11	Padas	50,22	33.860	674
12	Kasreman	31,49	24.019	763
13	Ngawi	70,56	84.359	1196
14	Paron	101,14	89.366	884
15	Kedunggalar	129,65	74.113	572
16	Pitu	56,01	28.240	504
17	Widodaren	92,26	70.881	768
18	Mantingan	62,21	41.878	673
19	Karanganyar	138,29	31.496	228
Jumlah		1.295,98	882.221	681

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

Berdasarkan jumlah penduduknya, Kecamatan Paron merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sebanyak 89.366 jiwa. Namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru terletak di Kecamatan Ngawi sebesar 1196 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gerih



sebesar 1086 jiwa/ km<sup>2</sup>. Di Kecamatan Ngawi dan Kecamatan Gerih setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh kurang lebih 1000 orang. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Ngawi dapat dipengaruhi oleh fungsi kecamatan ini yaitu selain sebagai kota kecamatan juga sebagai ibukota kabupaten, maka hampir seluruh kegiatan pemerintahan berpusat di Kecamatan Ngawi.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat dipandang sebagai suatu potensi sumber daya baru yaitu ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Namun hal tersebut menuntut adanya penyediaan lapangan kerja yang seimbang dengan jumlah tenaga kerja. Jika tidak terjadi keseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja maka dapat dipastikan akan timbul permasalahan baru bagi wilayah tersebut yaitu angka pengangguran yang tinggi.

Lapangan pekerjaan di bidang-bidang pertanian masih menjadi profesi utama dari sebagian besar penduduk di Kabupaten Ngawi. Sektor pertanian ini merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja. Sebanyak 328.891 penduduk Ngawi berprofesi di bidang pertanian. Kecamatan Sine merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang berprofesi di bidang pertanian.

Selain bidang pertanian, profesi dibidang jasa juga banyak ditekuni oleh masyarakat setempat. Kecamatan Paron merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang jasa terbanyak yaitu 12.783 orang.



Selain kedua bidang diatas, lapangan kerja yang cukup potensial dan menyerap tenaga kerja adalah sekto industri (pertambangan/penggalian, industri pengolahan, listrik/gas/air, dan kontruksi/bangunan), sektor perdagangan (hotel, restoran, dll), dan sektor keuangan. Penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut paling banyak terdapat di Kecamatan Ngawi. Peningkatan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dari penduduk setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Di lain pihak, menurut laporan Dinas Transmigrasi, Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2009 terdapat 27.740 penduduk Kabupaten Ngawi tercatat sebagai pencari kerja (pengangguran terbuka). Sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.683 orang dan jumlah penempatan kerja hanya untuk 1.892 orang.

Berikut ini tabel 4.3 untuk mengetahui tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2009 :



Tabel 4.3

## Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2009

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun	
			2008	2009
1.	Penduduk Rawan Sosial dan Sarana			
	a. Keluarga fakir miskin	Jiwa	54.341	35.267
	b. Balita terlantar	Jiwa	66	66
	c. Anak terlantar	Jiwa	10.957	10.958
	d. Lanjut usia terlantar	Jiwa	6.051	6.051
	e. Gelandangan	Jiwa	17	17
	f. Penyandang cacat	Jiwa	2.884	2.110
	g. Korban bencana alam & korban lainnya	Jiwa	452	1028
	h. Pengemis	Jiwa	45	45
2.	Panti Asuhan			
	a. Panti sosial asuhan yatim piatu	Buah	7	7
	b. Panti sosial tresna werda	Buah	1	1
3.	Potensi Kesejahteraan Sosial			
	a. Karang taruna	Buah	217	217
	b. Tenaga kessos masyarakat	Orang	1.168	1.168
	c. Organisasi sosial	Buah	10	10
4.	Penduduk Miskin			
	Jumlah rumah tangga miskin	KK	82.572	82.572

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ngawi 2010.

Sejalan dengan hal tersebut, Indikator keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tolok ukur tersebut dapat ditetapkan strategi pembangunan tahun 2008 dan mensinergikan seluruh program pembangunan agar tepat sasaran dan memiliki keluaran berfokus kesejahteraan masyarakat. IPM Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi. Pada tahun 1996 IPM Ngawi sebesar 65,00, kemudian menurun sebesar 2,60 % menjadi 58,84 pada tahun 1999, dan pada tahun 2002 kembali naik menjadi 61,42, sedangkan pada



tahun 2004 meningkat lagi menjadi 63,99. Mendasar data BPS Propinsi Jawa Timur pada tahun 2006, Angka Harapan Hidup 72,58; rata-rata lama sekolah adalah 6,30; Angka melek huruf 0 dan Paritas daya beli 54,50; dengan keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi sebesar 63,59.

### 3. Kondisi Perekonomian Daerah

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi pula, perekonomian di Kabupaten Ngawi menunjukkan stabilitas yang signifikan. Indikator perekonomian daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor perekonomian, yang meliputi 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, dengan komposisi pertumbuhan yang dituangkan dalam nominal dari tahun ke tahun. Indikator dari sektor pertanian dalam jumlah satuan rupiah merupakan sektor yang paling dominan serta mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dikaji terhadap harga berlaku dan harga konstan sektor ini mengalami stagnasi, hal ini perlu disikapi dengan mengupayakan peningkatan pada sektor-sektor dominan.

Berikut ini data untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Salah satu indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Ngawi merupakan jumlah seluruh nilai tambah dari produk barang dan jasa yang dasar pengukurannya timbul akibat adanya aktivitas ekonomi.



Sampai dengan tahun 2008 perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan tahun 2008 sekitar 36,9 %. Tidaklah aneh apabila sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini dari tahun ketahun mengalami penurunan walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Sektor lainnya yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menyumbangkan lebih dari 25 % dari total PDRB.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Angka pertumbuhan menunjukkan kenaikan pertumbuhan barang/jasa terhadap tahun sebelumnya, dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka apabila sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang tinggi secara langsung akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.

PDRB menurut lapangan usaha berdasar harga berlaku tahun 2008 mencapai 5,770 milyar rupiah, naik sekitar 12,8 % dari tahun



2007 yang mencapai 5,031 milyar rupiah, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4  
Estimasi PDRB Kab. Ngawi menurut Lapangan Usaha  
atas dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008  
(juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008
1	Pertanian	1.629.981,80	1.843.370,50	2.129.128,28
2	Pertambangan&Penggalian	23.924,26	27.821,13	31.159,67
3	Industri Pengolahan	275.496,96	306.568,98	354.275,13
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	31.946,84	36.199,99	44.111,18
5	Konstruksi	202.821,88	243.130,70	276.908,89
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.241.254,87	1.412.591,98	1.610.680,64
7	Pengangkutan & Komunikasi	181.477,29	205.072,67	233.711,75
8	Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan	218.291,53	243.939,08	273.336,32
9	Jasa –jasa	640.359,59	712.733,97	816.961,22
P D R B		4.445.555,03	5.031.428,99	5.770.273,06

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010.

PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan (2000) selama tahun 2006-2009 juga menunjukkan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 nilai PDRB menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.510.075,52 juta, meningkat menjadi sebesar Rp. 2.639.717,89 juta pada tahun 2007 dan



meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 2.785.335,43 juta pada tahun 2008.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5  
Estimasi PDRB Kab. Ngawi menurut Lapangan Usaha  
atas dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2003-2005  
(juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2006	2007	2008
1	Pertanian	941.025,88	985.007,46	1.039.356,65
2	Pertambangan & penggalian	14.403,57	15.442,31	16.286,80
3	Industri pengolahan	155.405,22	162.859,61	173.860,51
4	Listrik, gas & air bersih	13.730,36	14.673,00	16.013,48
5	Konstruksi	110.420,20	116.758,32	120.634,70
6	Perdagangan, hotel & restoran	697.427,05	745.925,20	793.681,83
7	Pengangkutan & komunikasi	87.412,59	92.497,17	98.137,08
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	137.199,62	142.016,95	148.281,52
9	Jasa-jasa	353.051,03	364.537,86	379.082,87
PDRB		2.510.075,52	2.639.717,89	2.785.335,43

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010.

a. Sektor Industri, Perdagangan, dan Pariwisata

Sektor industri, perdagangan dan pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Ngawi. Kontribusi ketiga sektor tersebut di atas terhadap PDRB Kabupaten Ngawi cukup dominan setelah sektor pertanian. Kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun



menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sektor potensial untuk di kembangkan.

#### 1) Sektor Industri

Sektor industri di Kabupaten Ngawi didukung oleh beberapa sub sektor dengan kontribusi yang berbeda-beda. Subsektor tersebut antara lain subsektor industri kecil dan kerajinan rakyat, subsektor industri kecil menengah, subsektor industri besar dan sedang, subsektor perusahaan konstruksi.

Perkembangan sektor industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sektor ini potensial untuk terus di kembangkan. Jumlah perusahaan, daya serap tenaga kerja, dan nilai produksi yang terus meningkat merupakan beberapa indikator perkembangan industri.

Pada tahun 2010 nilai produksi dari industri kecil/kerajinan rumah tangga mencapai 77828 milyar rupiah, sedangkan peningkatan industri kelistrikan dan air ditunjukkan dengan penambahan jumlah pelanggan dari tahun sebelumnya.

Penyebaran subsektor-subsektor industri diatas hampir merata di setiap kecamatan di Kabupaten Ngawi dengan jumlah yang berbeda-beda.

##### a. Subsektor industri kecil dan kerajinan rakyat

Subsektor industri kecil dan kerajinan rakyat masih cukup banyak di usahakan di beberapa wilayah Kabupaten Ngawi. Subsektor industri kecil dan kerajinn rakyat tersebut



terdiri atas kerajinan kulit, kerajinan kayu, kerajinan logam, anyaman gerabah, kerajinan tenun, industri makanan, dan industri lainnya.

Anyaman gerabah dan industri makanan merupakan salah satu industri kecil dan kerajinan rakyat yang paling banyak diusahakan. Industri anyaman gerabah ini dapat kita jumpai di 14 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Dari 14 kecamatan tersebut, Kecamatan Kendal dapat di jadikan sebagai sentra industri anyaman gerabah.

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Kendal terdapat 615 unit usaha anyaman gerabah, jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain.

Selain industri anyaman gerabah, subsektor industri kecil lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah industri makanan. Jumlah unit usaha industri ini adalah 1474 unit yang tersebar di 13 kecamatan. Kecamatan Ngawi merupakan kecamatan yang memiliki jumlah unit terbanyak untuk industri makanan dibandingkan dengan 12 kecamatan yang lain. Sebanyak 827 unit atau sekitar 56% industri makanan yang ada berlokasi di Kecamatan Ngawi. Jenis industri kecil dan kerajinan rakyat lainnya berdasarkan jumlah unit dan penyebarannya di masing-masing kecamatan dapat di lihat dari table berikut :



Tabel 4.6  
Industri kecil/kerajinan rakyat

Kode kecamatan	Kecamatan	Kerajinan Kulit	Kerajinan Kayu	Kerajinan Logam	Anyaman Gerabah	Kerajinan Tenun	Industri Makanan	Industri Lainnya
3521010	Sine	1	108	1	246	0	131	0
3521020	Ngrambe	234	3	3	0	0	0	78
3521030	Jogorogo	0	1	0	382	0	8	1
3521040	Kendal	1	7	0	615	0	0	0
3521050	Geneng	0	1	0	4	0	1	245
3521060	Kwadungan	0	0	0	68	0	93	14
3521070	Pangkur	0	10	0	233	0	44	4
3521080	Karangjati	0	10	0	42	0	56	0
3521190	Bringin	1	3	0	1	0	4	2
3521100	Padas	0	0	0	61	0	0	11
3521110	Ngawi	1	19	0	30	0	827	0
3521120	Paron	0	178	1	186	0	172	239
3521130	Kedungalar	0	6	4	0	0	2	0
3521140	Pitu	1	15	0	2	0	9	0
3521150	Widodaren	0	20	5	2	223	123	12
3521160	Mantingan	0	9	0	0	0	0	102
3521170	Karanganyar	1	11	0	0	0	0	0
3521180	Gerih	0	5	0	0	0	0	3
3521190	Kasreman	0	0	0	3	0	4	0

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi Tahun 2010.



Berdasarkan jumlah unitnya beberapa kecamatan dapat di golongkan sebagai sentra industri kecil dan kerajinan rakyat untuk jenis-jenis kerajinan tertentu. Untuk industri kerajinan kulit terbesar dengan 240 unit usaha. Kecamatan Paron dikanal dengan sentra industri kayu dengan 178 unit industri yang terbesar di beberapa lokasi. Sedangkan untuk kerajinan tenun didominasi oleh Kecamatan Widodaren karena 223 unit industri ini semuanya terlatak di Kecamatan Widodaren.

Jumlah unit untuk industri logam memang tidak terlalu banyak, hanya 14 unit usaha industri kerajinan logam yang terdapat di Kabupaten Ngawi. 14 unit tersebut tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sine memiliki 1 unit usaha, Kecamatan Paron memiliki 1 unit usaha, Kecamatan Ngrambe memiliki 3 unit usaha, Kecamatan Kedunggalan memiliki 4 unit usaha, dan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Widodaren dengan 5 unit usaha.

Selain industri-industri kecil yang sudah di sebutkan di atas, masih terdapat jenis industri kecil lainnya yaitu sebanyak 711 unit yang tersebar diseluruh kecamatan.

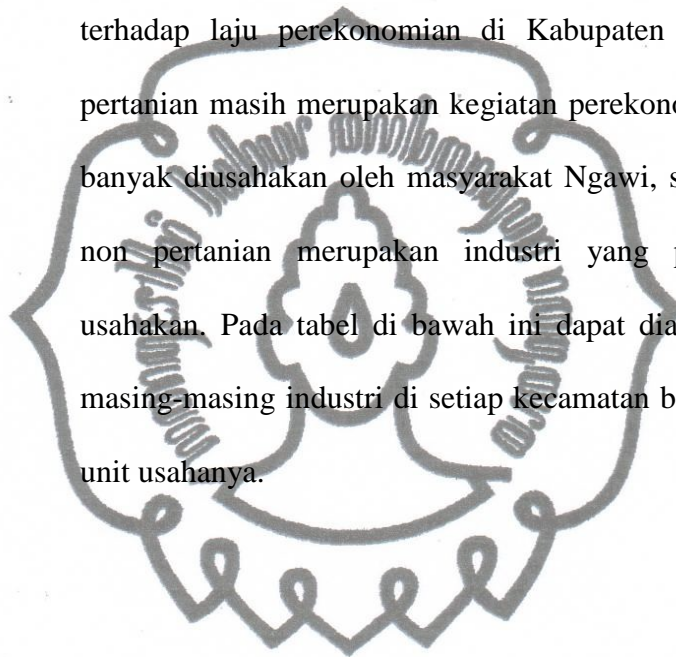
b. Subsektor industri kecil dan menengah

Subsektor industri lainnya yang mendukung sector industri adalah industri kecil menengah. Subsektor industri menengah di Kabupaten Ngawi terdiri atas industri pertanian,



industri non pertanian, industri perdagangan dan jasa, pertanian, dan pedagang kecil. Unit-unit industri tersebut di atas menyebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi dengan prosentase penyebaran yang berbeda-beda.

Masing-masing industri peranan yang berbeda-beda terhadap laju perekonomian di Kabupaten Ngawi. Kegiatan pertanian masih merupakan kegiatan perekonomian utama yang banyak diusahakan oleh masyarakat Ngawi, sedangkan industri non pertanian merupakan industri yang paling sedikit di usahakan. Pada tabel di bawah ini dapat diamati peranan dari masing-masing industri di setiap kecamatan berdasarkan jumlah unit usahanya.





Tabel 4.7

## Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Kode kecamatan	Kecamatan	Industri Pertanian	Inds. Non Pertanian	Perdagangan dan Jasa	Pertanian	Pedagang Kecil
3521010	Sine	10	19	95	889	369
3521020	Ngrambe	11	3	93	1135	391
3521030	Jogorogo	8	6	78	1044	350
3521040	Kendal	18	5	147	1247	363
3521050	Geneng	7	5	238	1573	791
3521060	Kwadungan	37	4	104	1068	545
3521070	Pangkur	47	4	38	892	307
3521080	Karangjati	16	11	173	1470	492
3521190	Bringin	2	7	35	760	271
3521100	Padas	19	3	79	1668	485
3521110	Ngawi	93	31	710	1040	1097
3521120	Paron	32	10	176	1470	876
3521130	Kedungalar	29	3	197	1620	389
3521140	Pitu	23	4	53	711	293
3521150	Widodaren	17	29	211	1993	583
3521160	Mantingan	15	16	112	1150	617
3521170	Karanganyar	8	4	37	205	267
3521180	Gerih	0	0	0	0	0
3521190	Kasreman	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi Tahun 2010.

*commit to user*



Pada Kecamatan Gerih dan Kasreman belum terdapat data karena kedua kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan sebelumnya, sehingga data untuk kedua kecamatan ini belum ada. Pertanian masih merupakan unit industri kecil menengah yang paling banyak di usahakan yaitu sekitar 63% dari jumlah industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Ngawi.

Untuk industri yang juga banyak diusahakan adalah pedagang kecil. Di Kabupaten Ngawi terdapat 8.486 unit pedagang kecil yang menyebar di setiap kecamatan. Jumlah pedagang kecil terbanyak terdapat di Kecamatan Ngawi yaitu 1097 unit.

Untuk industri yang bergerak di bidang perdagangan dan Jasa berjumlah 2576 unit dengan pusat industri di kecamatan Widodaren yang memiliki unit industri terbanyak yaitu 710 unit industri perdagangan dan jasa.

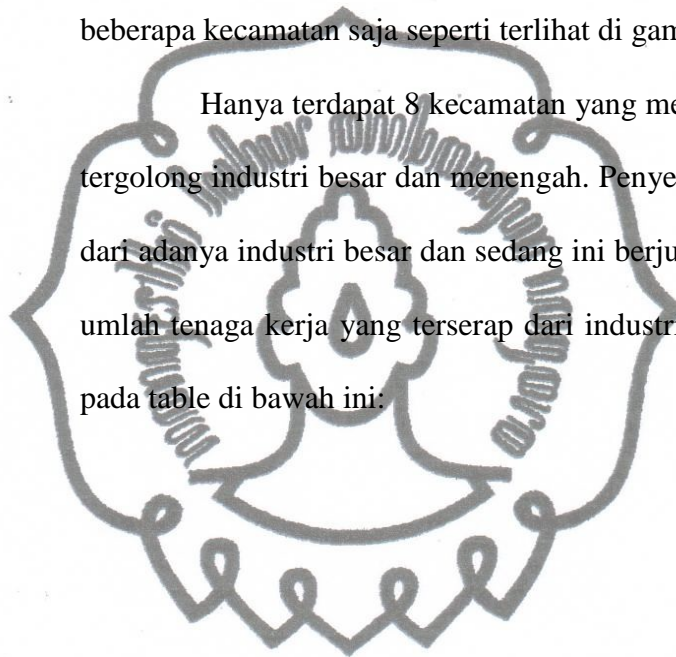
Unit industri kecil menengah lainnya yang berkembang saat ini adalah industri pertanian yang berjumlah 392 unit dan industri non pertanian berjumlah 168 unit. Industri pertanian banyak diusahakan di Kecamatan Ngawi, sedangkan industri non pertanian berkembang cukup baik di Kecamatan Widodaren.



c. Subsektor industri besar dan sedang

Subsektor industri besar dan sedang juga cukup berkembang di Kabupaten Ngawi. Sampai dengan tahun 2005 jumlah unit usaha industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Ngawi adalah 19 unit. Jumlah tersebut terletak di beberapa kecamatan saja seperti terlihat di gambar di bawah ini:

Hanya terdapat 8 kecamatan yang memiliki usaha yang tergolong industri besar dan menengah. Penyerapan tenaga kerja dari adanya industri besar dan sedang ini berjumlah 8.466 orang, umlah tenaga kerja yang terserap dari industri ini dapat diamati pada table di bawah ini:





Tabel 4.8  
Jumlah Industri Besar dan Sedang

Kode kecamatan	Kecamatan	Perusahaan	Tenaga Kerja
3521010	Sine	2	1.467
3521020	Ngrambe	0	0
3521030	Jogorogo	0	0
3521040	Kendal	0	0
3521050	Geneng	3	5.341
3521060	Kwadungan	0	0
3521070	Pangkur	0	0
3521080	Karangjati	1	1.205
3521190	Bringin	0	0
3521100	Padas	0	0
3521110	Ngawi	7	233
3521120	Paron	3	90
3521130	Kedungalar	1	43
3521140	Pitu	1	66
3521150	Widodaren	0	0
3521160	Mantingan	1	21
3521170	Karanganyar	0	0
3521180	Gerih	0	0
3521190	Kasreman	0	0

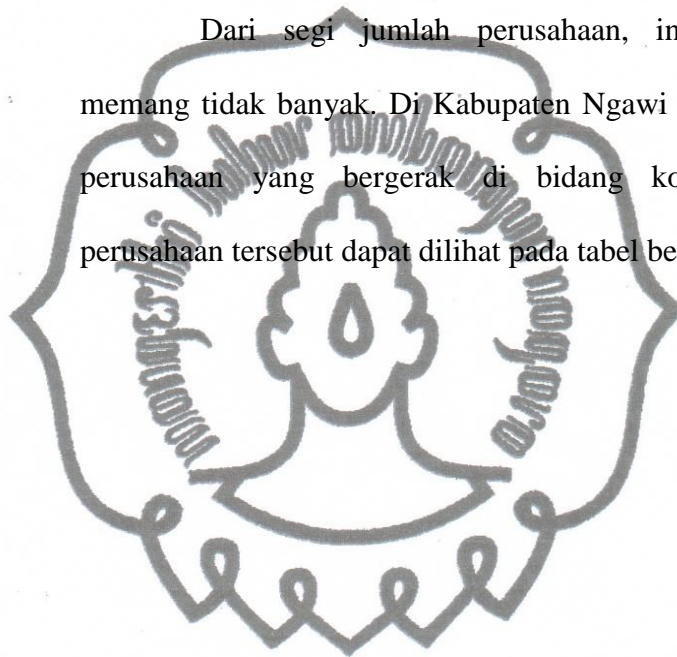
Sumber : BPS Kabupaten Ngawi 2010



Kecamatan Ngawi memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang bergerak di bidang industri besar dan menengah, namun penyerapan tenaga kerja terbesar dari industri tersebut terdapat di Kecamatan Geneng.

d. Subsektor industri konstruksi

Dari segi jumlah perusahaan, industri konstruksi memang tidak banyak. Di Kabupaten Ngawi hanya terdapat 76 perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Jumlah perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 4.9  
Jumlah Industri Konstruksi di Kabupaten Ngawi

Kode kecamatan	Kecamatan	Klasifikasi					
		B	M1	M2	K1	K2	K3
3521010	Sine	0	0	0	0	0	0
3521020	Ngrambe	0	0	0	0	0	0
3521030	Jogorogo	0	0	0	0	2	0
3521040	Kendal	0	0	0	1	3	3
3521050	Geneng	1	0	2	4	3	0
3521060	Kwadungan	0	0	0	0	1	0
3521070	Pangkur	0	0	0	0	0	0
3521080	Karangjati	0	0	0	0	0	0
3521190	Bringin	0	0	0	0	0	0
3521100	Padas	0	0	0	0	0	0
3521110	Ngawi	0	0	3	7	25	14
3521120	Paron	0	0	0	0	0	1
3521130	Kedungalar	0	0	0	0	0	1
3521140	Pitu	0	0	0	0	1	3
3521150	Widodaren	0	0	0	0	0	1
3521160	Mantingan	0	0	0	0	0	0
3521170	Karanganyar	0	0	0	0	0	0
3521180	Gerih	0	0	0	0	0	0
3521190	Kasreman	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi Tahun 2010



Seperti terlihat pada table di atas industri konstruksi ini hanya terdapat dikecamatan Ngawi, kecamatan Kendal, dan kecamatan Geneng. Pusat industri ini terdapat di Kecamatan Ngawi dengan jumlah perusahaan 49 buah dengan klasifikasi terbanyak K2 yaitu 25 perusahaan.

## 2) Sektor Perdagangan

Selain sektor industri sektor perdagangan juga memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan daerah. Penyumbang PDRB kedua terbesar setelah pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restorn.

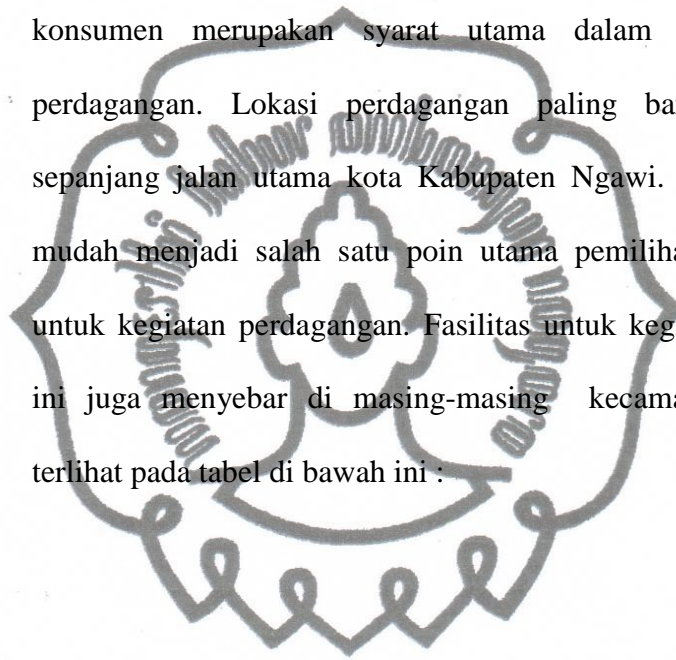
Dari tahun ke tahun kontribusi dari sektor ini terus mengalami peningkatan. Subsektor perdagangan masih merupakan subsektor penyokong terbesar dibandingkan subsektor hotel maupun restoran. Tingkat harga komoditi yang di perdagangan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, selain itu jenis komoditi yang di perdagangan setiap tahunnya makin beragam. Kecenderungan positif dari sektor perdagangan ini menuntut adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukungnya.

Ketersediaan tempat transaksi perdagangan baik yang berupa pasar permanen maupun tidak permanen, toko, ruko, dan lain-lain sangatlah dibutuhkan. Lokasi transaksi perdagangan yang di harapkan adalah lokasi yang cukup representative dalam menampung dan memasarkan komoditi perdagangan. Adanya lokasi yang representative diharapkan mampu meningkatkan jumlah



konsumen dan nilai transaksi yang dilakukan. Selain letak lokasi yang representative, jumlah dan penyebaran lokasi tersebut hendaknya mampu menjangkau konsumen yang dituju dengan mudah.

Lokasi pasar yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen merupakan syarat utama dalam pemilihan lokasi perdagangan. Lokasi perdagangan paling banyak terletak di sepanjang jalan utama kota Kabupaten Ngawi. Akses jalan yang mudah menjadi salah satu poin utama pemilihan lokasi tersebut untuk kegiatan perdagangan. Fasilitas untuk kegiatan perdagangan ini juga menyebar di masing-masing kecamatan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :





Tabel 4.10  
Jumlah Sarana Perdagangan

Kode kecamatan	Kecamatan	Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Tidak Permanen
3521010	Sine	8	7	2
3521020	Ngrambe	1	2	2
3521030	Jogorogo	0	2	3
3521040	Kendal	114	4	5
3521050	Geneng	1	4	0
3521060	Kwadungan	2	3	1
3521070	Pangkur	0	4	0
3521080	Karangjati	3	2	1
3521190	Bringin	0	5	0
3521100	Padas	0	3	2
3521110	Ngawi	6	5	6
3521120	Paron	1	6	5
3521130	Kedungalar	0	0	0
3521140	Pitu	1	2	1
3521150	Widodaren	11	8	4
3521160	Mantingan	3	3	1
3521170	Karanganyar	1	3	1
3521180	Gerih	0	2	2
3521190	Kasreman	0	1	1

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi 2010.

*commit to user*



Sarana perdagangan yang berupa kelompok pertokoan berjumlah 125 toko. Kecamatan Kendal memiliki sarana pertokoan terbanyak yaitu 114 toko dibandingkan kecamatan lain. Selain itu pasar permanen yang ada di wilayah kabupaten Ngawi adalah 66 buah dan pasar tidak permanen berjumlah 37 buah. Keberadaan pasar baik permanen maupun tidak permanen sangatlah penting mengingat kebanyakan pelaku kegiatan perdagangan di kabupaten Ngawi adalah pedagang kecil. Peningkatan fasilitas yang menunjang sarana dan prasarana perdagangan yang telah ada perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan perdagangan agar semakin meningkat.

### 3) Sektor Pariwisata

Tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Ngawi saat ini adalah pemandian Tawun, Waduk Pondok, Air Terjun Srambang, serta kebun teh Jamus yang berhawa sejuk dan terdapat kolam pemandian di sekitar perkebunan teh tersebut. Perkebunan teh ini terletak di Kecamatan Sine. Selain itu terdapat juga Situs Purbakala Trinil yang menyimpan fosil *Phytecantropus erectus* (Manusia Kera berjalan tegak) pertama kali di temukan oleh arkeolog Belanda bernama Eugene Debois.

Sebuah benteng peninggalan Belanda (Benteng Van Den Bosh) sebenarnya bisa pula dijadikan salah satu obyek wisata yang sangat bagus, apabila pemerintah Dati 2 Ngawi serius menanganinya. Benteng yang terletak diantara dua sungai besar itu



(Sungai Madiun dan Bengawan solo) sangat mungkin menyedot wisatawan karena letaknya di tengah kota.

#### 4) Pendidikan Masyarakat

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ngawi secara kasar dapat dilihat pada tingkat pendidikan penduduknya. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang hanya tamat SD=346.536 jiwa (62%), hanya tamat SLTP=113.839 jiwa (20%), hanya tamat SLTA=84.498 jiwa (15%) dan tamat akademi/ perguruan tinggi=17.969 jiwa (3%). Jika pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah mencakup tingkat pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat maka terdapat sekitar 82% yang berkualifikasi pendidikan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Ngawi masih kurang memadai.

Sarana pendidikan dan jumlah murid serta lembaga sekolah di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.11

## Sarana Pendidikan dan Jumlah Murid di Kabupaten Ngawi Tahun 2009

No.	Indikator	SD / MI	SMP / MTs	SMA/MAN/SMK
1.	Jumlah Murid	86.082	36.647	21.988
2.	Jumlah Lembaga	703	101	54
3.	Jumlah Guru	4.367 / 679	1.934 / 630	561 / 208 / 696
4.	Jumlah Gedung	715	100	49
	- Kondisi Rusak (RK)	2.122 / 263	116 / 76	33 / 10 / 26
	- Kondisi Baik (RK)	1.290 / 289	673 / 141	144 / 53 / 178
5.	Tingkat Kelulusan (%)	96,55	97,61	96,88

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Ngawi tahun 2010.

## 5) Infrastruktur

### a. Infrastruktur Jalan

Letak geografis Kabupaten Ngawi berada di perbatasan antara Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah. Pada posisi tersebut juga dilintasi jalur utama transportasi Pulau Jawa bagian selatan. Jalan lintas selatan Pulau Jawa ini memegang peranan yang sangat vital bagi perputaran roda perekonomian antar propinsi di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, kondisi infrastruktur jalan dan pengamanan jalan menjadi perhatian yang besar dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Sedangkan untuk mencapai Kabupaten Ngawi hanya dapat ditempuh melalui jalan darat. Transportasi jalan raya merupakan



sarana transportasi utama yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Ngawi. Sedangkan transportasi kereta api hanya digunakan sebagai sarana perhubungan antar kabupaten.

Ketergantungan terhadap transportasi jalan raya, menimbulkan tuntutan terhadap kondisi infrastruktur jalan yang memadai. Jalan kategori jalan negara yang melintasi Kabupaten Ngawi sepanjang 79,56 Km. Jalan negara ini pada umumnya digunakan sebagai jalur utama perhubungan antar propinsi dan antar kabupaten. Permukaan jalan tersebut, secara keseluruhan telah berlapis aspal dan termasuk Kelas I. Dari jalan sepanjang tersebut diatas, sebagian besar masih dalam kondisi baik dan sedang. Sedangkan jalan kategori jalan Kabupaten sepanjang 597,96 Km yang keseluruhannya termasuk kelas IIIC, dimana 493,96 Km sudah aspal, 97,52 Km permukaan kerikil, dan 6,48 Km masih permukaan tanah. Dari jalan sepanjang 597,96 Km yang dimiliki Kabupaten Ngawi yang kondisinya baik adalah 145,07 Km, yang kondisinya rusak mencapai 107,11 Km, dan yang rusak berat adalah 105,11 Km. Jalan kategori jalan kabupaten ini merupakan jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan atau antar desa di Kabupaten Ngawi. Kondisi jalan dan kelas jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.12

Panjang Jalan menurut Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan (km)

No.	Keadaan	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
1.	Jenis Permukaan			
	a. Di Aspal	79,56	-	493,96
	b. Kerikil	-	-	97,52
	c. Tanah	-	-	6,48
	d. Tidak dirinci	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>79,56</b>	<b>-</b>	<b>597,96</b>
2.	Kondisi Jalan			
	a. Baik	18,44	-	126,63
	b. Sedang	59,12	-	132,31
	c. Rusak	2,00	-	233,31
	d. Rusak Berat	-	-	105,11
	<b>Jumlah</b>	<b>79,56</b>	<b>-</b>	<b>597,96</b>
3.	Kelas Jalan			
	a. Kelas I	-	-	-
	b. Kelas II	79,56	-	-
	c. Kelas III	-	-	-
	d. Kelas III A	-	-	-
	e. Kelas III B	-	-	-
	f. Kelas IIIC	-	-	597,96
	g. Tidak dirinci	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>79,56</b>	<b>-</b>	<b>597,96</b>

Sumber : Dinas PU. Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Kab. Ngawi Tahun 2010.

b. Prasarana Jembatan

Panjang jembatan sampai dengan tahun 2005 mencapai 1.006,850 m (189 jembatan), dengan kondisi sebagai berikut : yang kondisi baik sepanjang 573,905 m (108 jembatan), yang kondisi sedang mencapai 251,713 m (20 jembatan) dan yang kondisinya rusak berat mencapai 70,479 m (13 jembatan).



### c. Sarana Irigasi

Secara fungsional jaringan irigasi meliputi 4 ( empat) komponen, yaitu : bendungan, saluran pembawa, saluran pembuang dan petak sawah. Pengembangan sistem irigasi primer dan skunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengembangan sistem irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Kondisi jaringan irigasi dapat dilihat secara terperinci sebagai berikut :

- Saluran primer (induk) ;panjang 21.400 Km, kerusakan 30 %
- Saluran skunder ;panjang 322.145 Km, kerusakan 25 %
- Saluran utama ; jumlah 412 buah, kerusakan 31,67 %
- Bangunan pendukung ; jumlah 1.001 buah, kerusakan 27,5 %.

Dua buah sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Sungai Madiun merupakan pendukung sistem pengairan yang cukup besar, disamping sejumlah anak-anak sungai yang menginduk pada dua sungai besar tersebut.

## 6) Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ngawi secara kasar dapat dilihat pada tingkat pendidikan penduduknya. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang hanya tamat



SD=346.536 jiwa (62%), hanya tamat SLTP=113.839 jiwa (20%), hanya tamat SLTA=84.498 jiwa (15%) dan tamat akademi/perguruan tinggi=17.969 jiwa (3%). Jika pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah mencakup tingkat pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat maka terdapat sekitar 82% yang berkualifikasi pendidikan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ngawi masih kurang memadai.

Menurut data pada tahun 2009 menyebutkan jumlah sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ngawi adalah 10.988 orang, yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTP atau kurang sejumlah 1.141 orang, SLTA sejumlah 6.608 orang, Sarjana Muda sejumlah 996 orang, Sarjana/Pasca Sarjana sejumlah 2.243 orang. Berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai yang termasuk golongan IV sejumlah 1.489 orang, golongan III sejumlah 6.570 orang, golongan II sejumlah 2.473 orang dan golongan I sejumlah 456 orang.

Selain SDM aparatur PNS tersebut di atas, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, juga direkrut SDM aparatur yang bersifat honorer ( non PNS ), yang meliputi Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 2.549 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1.253 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 1913 orang, sehingga jumlah keseluruhan SDM aparatur honorer mencapai 5.715 orang. Namun pada tahun 2007 sampai tahun 2009 secara berangsur-angsur para tenaga honorer di Kabupaten Ngawi akan diangkat menjadi PNS.



## B. Diskripsi Variabel Penelitian

### 1. Potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang retribusi pasar ditetapkan bahwa yang termasuk obyek retribusi pasar adalah setiap pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Ngawi. Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi dapat dikenakan retribusi pasar. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengelola pasar umum yang klasifikasinya dibedakan sebagai berikut :

1. Pasar kelas Ia ;
2. Pasar kelas Ib ;
3. Pasar kelas IIa ;
4. Pasar kelas IIb :

Retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 23 Tahun 2000 juga mengatur tentang sewa kios, los, dasaran, dan tarif retribusi pasar.

Dengan menggunakan formulasi perhitungan potensi penerimaan pasar (Soeratno dan Saleh, 2002:23), maka hasil perhitungan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.2.908.656.000,00, hal ini dikarenakan selama sepuluh tahun tidak ada penambahan jumlah kios, los, dasaran, tidak ada kenaikan retribusi, dan tidak ada kenaikan sewa tanah dan bangunan baik untuk kios, los, serta dasaran karena masih menggunakan Peraturan Daerah Nomer 23



Tahun 2000 yang mengatur tentang sewa kios, los, dasaran, dan tarif retribusi pasar.

## 2. Target, Realisasi, dan Potensi

Besarnya target, realisasi, porosentase realisasi, dan potensi retribusi pasar tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 seperti pada tabel

4.13

Tabel 4.13  
Target, Realisasi, dan Potensi Retribusi Pasar  
Di Kabupaten Ngawi Tahun 2001 – 2010  
(dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Potensi
2001	895.230.000	910.475.335	101,7	2.908.656.000
2002	915.840.000	940.325.500	102,67	2.908.656.000
2003	936.753.000	961.242.700	102,61	2.908.656.000
2004	975.500.000	1.075.537.600	110,25	2.908.656.000
2005	1.090.500.000	1.107.725.900	101,57	2.908.656.000
2006	1.100.000.000	1.135.830.300	103,25	2.908.656.000
2007	1.145.670.000	1.153.128.600	100,65	2.908.656.000
2008	1.240.500.000	1.254.404.100	101,12	2.908.656.000
2009	1.310.000.000	1.324.214.200	101,08	2.908.656.000
2010	2.200.000.000	2.286.784.695	103,94	2.908.656.000

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten  
Ngawi Tahun 2001 -2010.

*commit to user*



Pada tabel 4.13 terlihat besarnya prosentase realisasi retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi dari tahun 2001 sebesar 101,7%, tahun 2002 sebesar 102,67%, tahun 2003 sebesar 102,2,61%, tahun 2004 sebesar 110,25%, tahun 2005 sebesar 101,57%, tahun 2006 sebesar 103,25%, tahun 2007 sebesar 100,65%, tahun 2008 sebesar 101,12%, tahun 2009 sebesar 101,08%, dan pada tahun 2010 sebesar 103,94%..

### 3. Selisih antara Target, Realisasi, dan Potensi retribusi pasar

#### a. Selisih antara target dan realisasi retribusi pasar

Selisih antara target dn realisasi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 terlihat dalam Tabel 4.14 :



Tabel 4.14  
Selisih antara Target dan Realisasi Retribusi Pasar  
Tahun 2001 – 2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih
2001	895.230.000	910.475.335	15.245.335
2002	915.840.000	940.325.500	24.485.500
2003	936.753.000	961.242.700	24.489.700
2004	975.500.000	1.075.537.600	100.037.600
2005	1.090.500.000	1.107.725.900	17.225.900
2006	1.100.000.000	1.135.830.300	35.830.300
2007	1.145.670.000	1.153.128.600	7.458.600
2008	1.240.500.000	1.254.404.100	13.904.100
2009	1.310.000.000	1.324.214.200	14.214.200
2010	2.200.000.000	2.286.784.695	8.678.495

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi, (diolah).

Di dalam tabel 4.14 terlihat selisih antara target dengan realisasi retribusi pasar tahun 2001 sebesar Rp. 15.245.335,00, tahun 2002 sebesar Rp. 24.485.500,00, tahun 2003 sebesar Rp. 24.489.700,00, tahun 2004 sebesar Rp. 100.037.600,00, tahun 2005 sebesar Rp. 17.225.900,00, tahun 2006 sebesar Rp. 35.830.300,00, tahun 2007 sebesar Rp. 7.458.600,00, tahun 2008 sebesar Rp. 13.904.100,00,



tahun 2009 sebesar Rp. 14.214.200,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.678.495,00.

b. Selisih antara target dan potensi retribusi pasar

Selisih antara target dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi tahun 2001 sampai tahun 2010 terlihat pada tabel 4.15 :

Tabel 4.15  
Selisih antara Target dan Potensi Retribusi Pasar  
Tahun 2001 – 2010  
(dalam rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Potensi (Rp)	Selisih
2001	895.230.000	2.908.656.000	2.013.426.000
2002	915.840.000	2.908.656.000	1.992.816.000
2003	936.753.000	2.908.656.000	1.971.903.000
2004	975.500.000	2.908.656.000	1.933.156.000
2005	1.090.500.000	2.908.656.000	1.818.156.000
2006	1.100.000.000	2.908.656.000	1.808.656.000
2007	1.145.670.000	2.908.656.000	1.762.986.000
2008	1.240.500.000	2.908.656.000	1.668.156.000
2009	1.310.000.000	2.908.656.000	1.598.656.000
2010	895.230.000	2.908.656.000	708.656.000

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi, (diolah).



Di dalam tabel 4.15 terlihat selisih antara target dengan potensi retribusi pasar pada tahun 2001 sebesar Rp. 2.013.426.000,00, tahun 2002 sebesar Rp. 1.992.816.000,00, tahun 2003 sebesar Rp. 1.971.903.000,00, tahun 2004 sebesar Rp. 1.933.156.000,00, tahun 2005 sebesar Rp. 1.818.156.000,00, tahun 2006 sebesar Rp. 1.808.656.000,00, tahun 2007 sebesar Rp. 1.762.986.000,00, tahun 2008 sebesar Rp. 1.668.156.000,00, tahun 2009 sebesar Rp. 1.598.656.000,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 708.656.000,00.

c. Selisih antara realisasi dan potensi retribusi pasar

Selisih antara target dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi tahun 2001 sampai tahun 2010 terlihat pada tabel 4.16 :



Tabel 4.16  
 Selisih antara Realisasi dan Potensi Retribusi Pasar  
 Tahun 2001 – 2010  
 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Selisih
2001	910.475.335	2.908.656.000	1.998.180.665
2002	940.325.500	2.908.656.000	1.968.330.500
2003	961.242.700	2.908.656.000	1.947.413.300
2004	1.075.537.600	2.908.656.000	1.833.118.400
2005	1.107.725.900	2.908.656.000	1.800.930.100
2006	1.135.830.300	2.908.656.000	1.772.825.700
2007	1.153.128.600	2.908.656.000	1.755.527.400
2008	1.254.404.100	2.908.656.000	1.654.251.900
2009	1.324.214.200	2.908.656.000	1.584.441.800
2010	2.286.784.695	2.908.656.000	621.871.305

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi, (diolah).

Di dalam tabel 4.16 terlihat selisih antara realisasi dengan potensi retribusi pasar pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.998.180.665,00, tahun 2002 sebesar Rp. 1.968.330.500,00, tahun 2003 sebesar Rp. 1.947.413.300,00, tahun 2004 sebesar Rp. 1.833.118.400,00, tahun 2005 sebesar Rp. 1.800.930.100,00, tahun 2006 sebesar Rp.

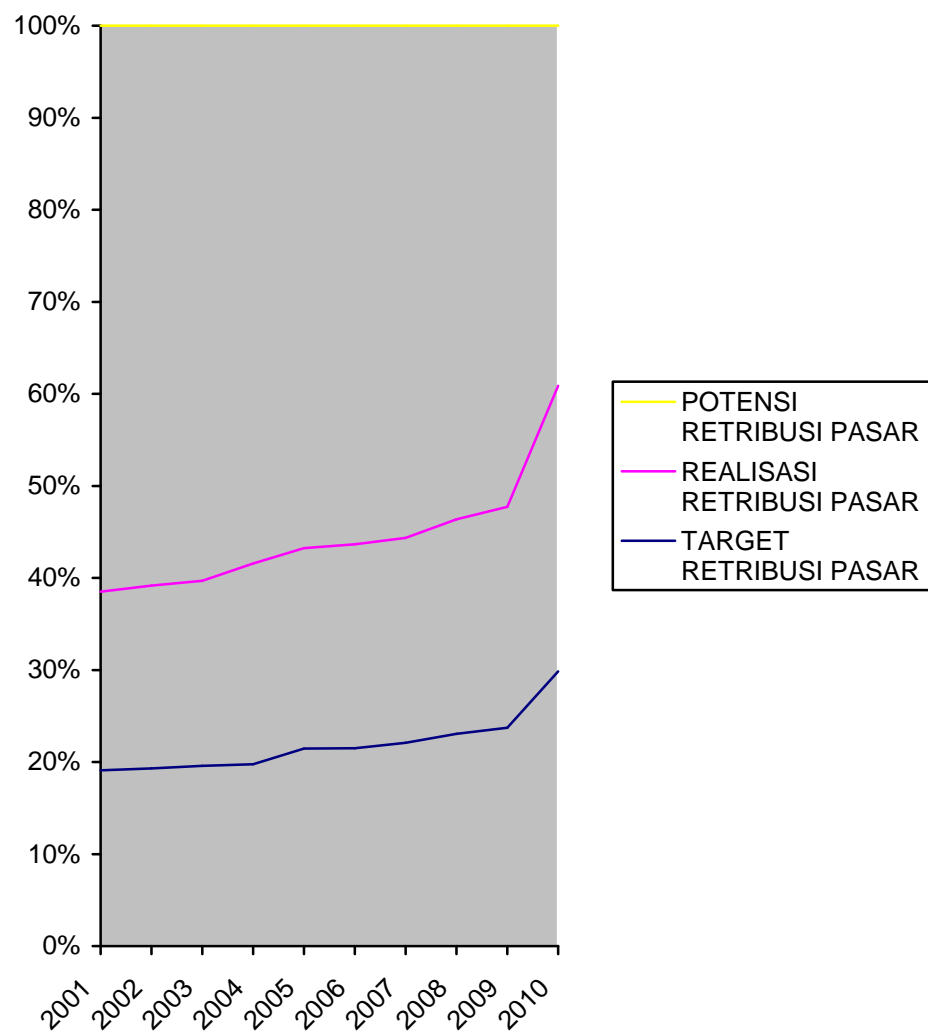


1.772.825.700,00, tahun 2007 sebesar Rp. 1.755.527.400,00, tahun 2008 sebesar Rp. 1.654.251.900,00, tahun 2009 sebesar Rp. 1.584.441.800,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 621.871.305,00.

d. Target, realisasi, dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi

Target, realisasi, dan potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 4.1



Sumber : Data diolah



Di dalam diagram terlihat penetapan target retribusi pasar Pemerintah Kabupaten Ngawi belum didasarkan pada potensi yang ada. Target retribusi pasar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ngawi masih dibawah potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan retribusi pasar selama periode pengamatan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Jadi hipotesis di duga target retribusi pasar yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan potensi yang ada.
2. Hipotesis adanya selisih antara target, realisasi, dan potensi adalah benar, hal ini terbukti selisih antara target dengan realisasi retribusi pasar tahun tahun 2001 sebesar Rp. 15.245.335,00, tahun 2002 sebesar Rp. 24.485.500,00, tahun 2003 sebesar Rp. 24.489.700,00, tahun 2004 sebesar Rp. 100.037.600,00, tahun 2005 sebesar Rp. 17.225.900,00, tahun 2006 sebesar Rp. 35.830.300,00, tahun 2007 sebesar Rp. 7.458.600,00, tahun 2008 sebesar Rp. 13.904.100,00, tahun 2009 sebesar Rp. 14.214.200,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.678.495,00, selisih antara target dan potensi pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.989.905.400,00, tahun 2002 sebesar Rp. 1.969.295.400,00, tahun 2003 sebesar Rp. 1.948.382.400,00, tahun 2004 sebesar Rp. 1.909.635.400,00, tahun 2005 sebesar Rp. 1.794.635.400,00, tahun 2006 sebesar Rp. 1.785.135.400,00, tahun 2007 sebesar Rp. 1.739.465.400,00, tahun 2008



sebesar Rp. 1.644.635.400,00, tahun 2009 sebesar Rp. 1.575.135.400,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 685.135.400,00, sedangkan selisih antara realisasi dengan potensi retribusi pasar pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.974.660.065,00, tahun 2002 sebesar Rp. 1.944.809.900,00, tahun 2003 sebesar Rp. 1.923.892.700,00, tahun 2004 sebesar Rp. 1.809.597.800,00, tahun 2005 sebesar Rp. 17.225.900,00, tahun 2006 sebesar Rp. 1.749.305.100,00, tahun 2007 sebesar Rp. 1.732.006.800,00, tahun 2008 sebesar Rp. 1.603.731.300,00, tahun 2009 sebesar Rp. 1.560.921.200,00, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 598.350.705,00.

3. Target retribusi pasar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ngawi masih dibawah potensi retribusi pasar di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ngawi selaku pihak yang menetapkan target retribusi pasar perlu melakukan perhitungan secara akurat terhadap besarnya target retribusi pasar, sehingga potensi penerimaan retribusi pasar semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## B. Saran

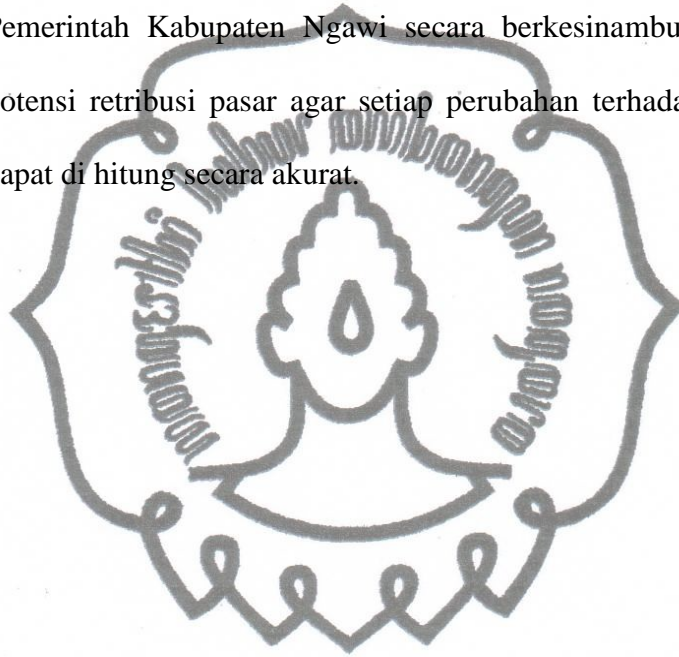
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pengambilan kebijakan serta upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu mencermati untuk potensi retribusi pasar di seluruh pasar yang ada. Potensi tersebut meliputi fasilitas yang



ada yaitu luas kios, luas los pasar, luas dasaran pasar, jumlah kios, los, dan dasaran.

2. Melihat potensi retribusi pasar yang cukup besar maka Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu menaikkan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada di pasar agar dapat dimanfaatkan lebih lama.
3. Pemerintah Kabupaten Ngawi secara berkesinambungan menghitung potensi retribusi pasar agar setiap perubahan terhadap obyek retribusi dapat di hitung secara akurat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Surachman. (arif@gajahmada.edu). 20 januari 2011. Potensi, Efisiensi, Efektifitas, Pemungutan Retribusi Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire. kepada danang yanmar (danangyanmar@ymail.com).
- BPS Kabupaten Ngawi. 2008. *Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2008*. Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ngawi. 250 hal.
- BPS Kabupaten Ngawi. 2009. *Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2009*. Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ngawi. 248 hal.
- BPS Kabupaten Ngawi. 2010. *Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2010*. Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ngawi. 247 hal.
- Kamus Bahasa Indonesia. *Potensi*. (On-line). [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org). diakses 19 Januari 2011.
- Munawir, S, 1998, *Perpajakan*, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfathih 2000, Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, *Laporan Akhir Kerjasama*, Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU Studi Ekonomi UGM.
- Mulyanto, 2003, Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 2000. *Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar*. Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ngawi. 5 hal.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Direktorat Federal Otonomi Daerah. Jakarta. 8 hal.
- Soeratno dan Samsubar Saleh, 2002, Pengkajian Potensi Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Gunung Kidul, *Laporan Akhir*, Kerjasama PPE FE-UGM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul.
- Siddik, Machfud, 1994, *Keuangan Daerah*, Universitas Terbuka, Jakarta.



Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Direktorat Jederal Otonomi Daerah. Jakarta. 10 hal.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Direktorat Jederal Otonomi Daerah. Jakarta. 159 hal.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. dan Retribusi Daerah*, Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Direktorat Jederal Otonomi Daerah. Jakarta. 75 hal.

Wikipedia. *Retribusi*. (On-line), <http://id.wikipedia.org/wiki/retribusi>. Diakses 19 Januari 2011.





## INTISARI

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang sangat potensial. Penerimaan daerah dari retribusi pasar cukup besar dan ke depan apabila dikelola dengan baik prospeknya bisa diandalkan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi retribusi pasar dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi.

Hasil perhitungan potensi retribusi pasar dalam sepuluh tahun adalah sebesar Rp. 2.908.656.000,- (2001), Rp. 2.908.656.000,- (2002), Rp. 2.908.656.000,- (2003), Rp. 2.908.656.000,- (2004), Rp. 2.908.656.000,- (2005), Rp. 2.908.656.000,- (2006), Rp. 2.908.656.000,- (2007), Rp. 2.908.656.000,- (2008), Rp. 2.908.656.000,- (2009), Rp. 2.908.656.000,- (2010), hal ini dikarenakan selama sepuluh tahun tersebut tidak ada penambahan jumlah kios, los, dasaran, tidak ada kenaikan retribusi, dan tidak ada kenaikan sewa tanah dan bangunan baik untuk kios, los, serta dasaran.

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, dalam penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi secara berkesinambungan menghitung potensi retribusi pasar agar setiap perubahan terhadap obyek retribusi dapat di hitung secara akurat dan hasil perhitungan potensi retribusi pasar tersebut harus dijadikan dasar penetapan target retribusi pasar.

Kata Kunci : retribusi pasar, retribusi daerah, potensi



## **POTENSI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN NGAWI**



**Drs. Agustinus Suryantoro, M.Si.**

**NIP. 19590911 1987021 001**

**Drs. Akhmad Daerobi, MS.**

**NIP. 19570804 1986011 002**

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

**Dr. JJ. Sarunngu, MS.**

**NIP. 19510701 198010 1 001**



